



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MURZAKIAH**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **481179**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.796.859.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 706 m2/170 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 564.000.000
3. Tanah Seluas 444 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 597 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, Rp. 417.900.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 406 m2/129 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , Rp. 267.959.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **242.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **400.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	689.240.314
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.128.099.314
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.128.099.314

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.